

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

IV.1 Analisa Deskriptif

Selama tahun anggaran 2006, sebanyak 333 Pemerintah Kabupaten/Kota telah membuat laporan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun, jumlah tersebut belum menunjukkan keseluruhan Kabupaten/Kota di Indonesia. Masih ada sekitar 23,09% dari total Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan keuangan. Tabel di bawah ini menyajikan rincian tiap Propinsi dan persentase perbandingan antara Jumlah Kabupaten/Kota dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan Keuangan:

No	Propinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Yg Menyampaikan LK thn 2006	Percentage
1	Nanggroe Aceh Darussalam	21	20	95.2%
2	Sumatera Utara	25	4	16.0%
3	Sumatera Barat	19	6	31.6%
4	Riau	11	5	45.5%
5	Kepulauan Riau	6	6	100.0%
6	Sumatera Selatan	14	14	100.0%
7	Bengkulu	9	3	33.3%
8	Jambi	10	4	40.0%
9	Lampung	10	10	100.0%
10	Bangka Belitung	7	7	100.0%
12	Jawa Barat	25	25	100.0%
13	Jawa Tengah	35	35	100.0%
14	DI Yogyakarta	5	5	100.0%

No	Propinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Yg Menyampaikan LK thn 2006	Percentage
15	Jawa Timur	38	36	94.7%
16	Banten	6	6	100.0%
17	Bali	9	9	100.0%
18	Kalimantan Barat	12	12	100.0%
19	Kalimantan Selatan	13	11	84.6%
20	Kalimantan Tengah	14	7	50.0%
21	Kalimantan Timur	13	13	100.0%
22	Sulawesi Utara	9	9	100.0%
23	Sulawesi Tengah	10	10	100.0%
24	Sulawesi Tenggara	10	10	100.0%
25	Sulawesi Barat	5	4	80.0%
26	Sulawesi Selatan	23	23	100.0%
27	Gorontalo	5	5	100.0%
28	Nusa Tenggara Barat	9	9	100.0%
29	Nusa Tenggara Timur	16	5	31.3%
30	Maluku	8	3	37.5%
31	Maluku Utara	9	8	88.9%
32	Papua	20	6	30.0%
33	Irian Barat	7	3	42.9%
	Jumlah	433	333	
			76.91%	

Tabel IV.1.1 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2006

Tingkat Pelaksanaan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota	Persentase
Tingkat Pelaksanaan Rendah (jml Kabupaten < 50%)	9	30%
Tingkat Pelaksanaan Sedang (jml Kabupaten >= 50% - 70%)	1	3%
Tingkat Pelaksanaan Tinggi (jml Kabupaten > 70%)	22	67%

	32	100%
--	----	------

Tabel IV.1.2 Tingkat Pelaksanaan Propinsi

Dalam UU No 17 Tahun 2003 Pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Agar memenuhi tenggat waktu, diharapkan entitas daerah menyerahkan Laporan Keuangan untuk diperiksa BPK dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tabel di atas memberi gambaran umum bahwa tingkat pelaksanaan di tiap-tiap propinsi berbeda-beda. Ada propinsi yang seluruh Kabupaten/Kota termasuk dalam propinsi tersebut seluruhnya membuat dan menyampaikan laporan keuangan, tetapi ada juga propinsi di mana Kabupaten/Kota termasuk dalam propinsi tersebut hanya sedikit yang membuat dan menyampaikan laporan keuangan. Analisa akan dibagi lagi dalam tiga penggolongan yaitu; rendah, sedang, tinggi.

Jika, analisa dilakukan per propinsi akan didapatkan tiga macam kelompok berdasarkan kepatuhan Propinsi tersebut atas Undang-Undang. Tiga kelompok itu terbagi atas;

- **Tingkat Pelaksanaan Rendah**

Termasuk kelompok ini adalah Propinsi dengan persentase perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2006 terhadap total Kabupaten/Kota dalam propinsi tersebut kurang dari 50%. Hasil perhitungan menunjukkan masih ada 10 propinsi yang termasuk tingkat pelaksanaan rendah.

Propinsi-propinsi itu adalah: Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Irian Barat.

- Tingkat Pelaksanaan Sedang

Termasuk kelompok ini adalah Propinsi dengan persentase perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2006 terhadap total Kabupaten/Kota dalam propinsi tersebut lebih dari 50% hingga 70%. Hasil perhitungan menunjukkan hanya satu propinsi yang termasuk kelompok tingkat pelaksanaan sedang, yakni Propinsi Kalimantan Tengah.

- Tingkat Pelaksanaan Tinggi

Termasuk kelompok ini adalah Propinsi dengan persentase perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2006 terhadap total Kabupaten/Kota dalam propinsi tersebut lebih dari 70%. Hasil perhitungan menunjukkan ada 22 Propinsi yang hampir sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota dalam Propinsi tersebut telah menyerahkan Laporan Keuangan untuk diperiksa.

IV.2 Hasil Scoring

Skor indeks kualitas dihitung berdasarkan dua dimensi penilaian berikut:

1. Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan

Sesuai PP No 24 Tahun 2005, suatu Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi-informasi yang diperlukan agar penyajian laporan keuangan tersebut wajar.

Skor indeks dihitung per komponen laporan keuangan.

2. Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme pengendalian internal diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang akurat, tepat, dan relevan. Pengendalian internal meliputi aspek sistem keuangan yang

tertib, standar operasi/prosedur yang memadai, pengendalian pada bagian pendapatan, belanja, aktiva tetap, dan persediaan.

Tabel berikut menggambarkan hasil *scoring* untuk tiap-tiap sampel terpilih. Dari hasil tersebut dapat dilihat kualitas laporan keuangan Kabupaten/Kota yang diserahkan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan				SPI	Total Skor
			LRA	Neraca	LAK	CaL K		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Simeulue	10	8	3	12	5	38
2	Darussalam	Aceh Selatan	6	6	2	6	13	33
3	Sumatera Utara	Karo	10	12	3	5	6	36
4	Sumatera Barat	Agam	6	10	2	12	4	34
5	Riau	Rokan Hilir	12	8	2	12	4	38
6	SumSel	Lahat	12	15	3	10	0	40
7	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	12	17	3	5	4	41
8	Bengkulu	Bengkulu Selatan	12	17	3	12	4	48
9	Jambi	Tanjung Jabung Barat	12	12	3	12	3	42
10	Lampung	Tulang Bawang	10	11	3	16	5	45
11	BaBel	Belitung Timur	12	12	3	16	3	46
12		Bangka Barat	12	8	2	14	5	41
13	JaBar	Banjar	12	11	3	15	3	44
14	JaTeng	Cilacap	11	16	3	16	12	58
15		Purbalingga	12	11	3	18	10	54
16	DIY	Kulonprogo	11	16	3	16	12	58
17		Bantul	5	13	3	13	12	46

No	Propinsi	Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan				SPI	Total Skor
			LRA	Neraca	LAK	CaL K		
18	JaTim	Bondowoso	7	16	1	5	9	38
19	Banten	Serang	9	14	3	10	9	45
20	Bali	Jembrana	7	14	3	5	12	41
21		Buleleng	8	13	3	7	10	41
22	KalBar	Pontianak	9	13	2	8	7	39
23		Ketapang	11	10	2	7	12	42
24	KalSel	Barito Kuala	7	13	3	8	9	40
25		Hulu Sungai Tengah	7	12	3	10	7	39
26	KalTeng	Barito Utara	4	10	3	8	9	34
27	KalTim	Pasir	9	12	3	16	10	50
28		Nunukan	7	15	2	10	13	47
29	SulUt	Minahasa Utara	9	13	2	13	6	43
30		Talaud	7	5	2	5	9	28
31	SulTeng	Parigi Moutong	7	6	2	5	17	37
32	SulTra	Buton	4	10	2	2	7	25
33	SulBar	Mamuju	7	12	3	5	6	33
34	SulSel	Soppeng	7	8	2	6	8	31
35	Gorontalo	Gorontalo	9	14	3	8	11	45
36	NTB	Sumbawa	9	10	3	8	11	41
37	NTT	Ende	9	13	3	6	7	38
38	Maluku Utara	Halmahera Timur	7	9	3	2	6	27
39	Papua	Merauke	6	10	3	5	6	30
40	IrBa	Kaimana	9	14	3	12	8	46

Tabel IV.2.1 Tabel Skor Indeks Kabupaten/Kota

Tabel berisi keterangan nama Propinsi, Kabupaten/Kota yang menjadi sampel, skor per dimensi dan total skor untuk tiap Kabupaten/Kota. Skor per dimensi terbagi antara dimensi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern. Dimensi laporan

keuangan menilai penyajian informasi dalam tiap-tiap laporan keuangan berikut; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dimensi berikutnya adalah penilaian atas sistem pengendalian interan (SPI) yang berlaku dalam pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.

Total skor tertinggi bila semua komponen penilaian dari tiap dimensi terpenuhi adalah 78. Dari hasil penilaian mutu menunjukkan skor tertinggi adalah 58 dan skor terendah adalah 25. Beragamnya skor yang dicapai tiap Kabupaten/Kota yang menjadi sampel menunjukkan belum adanya standarisasi penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas yang dihasilkan pun berbeda-beda. Selain itu, kebanyakan Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2006 belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

IV.2.1 Dimensi Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari penyajian informasi-informasi mengenai kondisi keuangan Kabupaten/Kota terkait, maka sangat penting dan keharusan bagi Kabupaten/Kota mengungkapkan informasi sejelas-jelasnya dan seakurat mungkin sebagai bentuk tanggung jawab terhadap *stakeholder* Kabupaten/Kota tersebut.

Scoring yang dilakukan sebelumnya menunjukkan variasi nilai untuk tiap Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian. Berikut penjelasan untuk tiap sub-dimensi penilaian:

1. Laporan Realisasi Anggaran

<i>LRA</i>	
Mean	8.8
Standard Error	0.382635932
Median	9
Mode	7
Standard Deviation	2.420002119

<i>LRA</i>	
Sample Variance	5.856410256
Kurtosis	-0.995360716
Skewness	-0.130719935
Range	8
Minimum	4
Maximum	12
Sum	352
Count	40

Tabel IV.2.2 Statistik Deskriptif LRA

Pada sub-dimensi Laporan Realisasi Anggaran ini, jika semua kriteria penilaian terpenuhi nilai maksimal yang bisa dicapai adalah 15. Dari penilaian tiap sampel, nilai tertinggi adalah 12 dan nilai terendah adalah 4. Rata-rata skor untuk LRA adalah 8,8 dengan modus nilai adalah 7. Berarti, Kabupaten/Kota yang membuat laporan keuangan tahun 2006 sudah bisa memenuhi 58,67% syarat-syarat penyusunan laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No.24 tahun 2005.

Dapat dilihat juga terjadi variasi nilai untuk LRA. Variasi yang terjadi pada disebabkan karena banyak Kabupaten/Kota yang belum mengklasifikasikan komponen dan pendapatan belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, terutama untuk klasifikasi belanja.

2. Neraca

<i>Neraca</i>	
Mean	11.725
Standard Error	0.477691
Median	12
Mode	12
Standard Deviation	3.021186
Sample Variance	9.127564
Kurtosis	-0.38181

<i>Neraca</i>	
Skewness	-0.27453
Range	12
Minimum	5
Maximum	17
Sum	469
Count	40

Tabel IV.2.3 Statistik Deskriptif Neraca

Pada sub-dimensi Neraca, jika semua kriteria penilaian terpenuhi nilai maksimal yang bisa dicapai adalah 18. Dari tabel di atas dapat dilihat rentang nilai semakin besar dari 5 hingga 17. Rata-rata skor adalah 11,725 dengan modus nilai adalah 12. Jika memperhitungkan rata-rata skor dengan nilai maksimal berarti Kabupaten/Kota yang membuat laporan keuangan tahun 2006 sudah memenuhi 65,14% syarat-syarat penyusunan Neraca seperti diatur dalam PP No.24 tahun 2005.

Kemudian, rentang nilai yang besar dapat dijelaskan sebagai berikut; banyak Kabupaten/Kota yang kurang mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dalam neraca. Penyebabnya antara lain karena pencatatan aset dan kewajiban selama ini dilakukan melalui sistem pencatatan tunggal yang tidak dapat menghasilkan neraca secara langsung. Selain itu, pencatatan aset pada umumnya dilakukan dalam berbagai subsistem yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan kurang dapat diyakini keandalannya (bultek02 KSAP,2005).

3. Laporan Arus Kas

<i>LAK</i>	
Mean	2.65
Standard Error	0.084352739
Median	3
Mode	3
Standard Deviation	0.533493566

<i>LAK</i>	
Sample Variance	0.284615385
Kurtosis	0.431709246
Skewness	-1.178522175
Range	2
Minimum	1
Maximum	3
Sum	106
Count	40

Tabel IV.2.4 Statistik Deskriptif LAK

Pada sub-dimensi Laporan Arus Kas (LAK), rentang nilai tidak terlalu besar dan hanya sedikit variasi. Nilai minimum adalah 1 dan nilai maksimal adalah 3. Berarti, Kabupaten/Kota telah berhasil memenuhi 88,33% syarat-syarat penyusunan laporan keuangan sesuai PP No.24 tahun 2005. Sebagian besar LAK yang dinilai telah menginformasikan arus kas dengan tepat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

<i>CaLK</i>	
Mean	9.525
Standard Error	0.684992514
Median	9
Mode	5
Standard Deviation	4.332273046
Sample Variance	18.76858974
Kurtosis	-1.029138932
Skewness	0.20592164
Range	16
Minimum	2
Maximum	18
Sum	381
Count	40

Tabel IV.2.5 Statistik Deskriptif CaLK

Rata-rata sampel penelitian juga menyertakan Catatan atas Laporan Keuangan supaya informasi yang disampaikan dalam ketiga laporan keuangan sebelumnya mudah dimengerti oleh pengguna. Jika Kabupaten/Kota yang membuat dan menyampaikan laporan keuangan memenuhi semua kriteria penilaian, nilai maksimal dicapai adalah sebesar 18. Dari penilaian diketahui nilai tertinggi yang dicapai adalah 18 dan nilai terendah adalah 2. Rata-rata nilai keseluruhan sampel adalah 9,525 dengan modus nilai adalah 5. Berarti, Kabupaten/Kota yang membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2006 baru memenuhi 52,92% syarat-syarat penyusunan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PP No.24 tahun 2005.

Diketahui dari tabel skor indeks yang disajikan sebelumnya, terjadi variasi nilai untuk sud-dimensi CaLK. Nilai yang bervariasi ini terjadi karena masih banyak Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian tidak membuat catatan sejelas-jelasnya, beberapa hanya menjelaskan kebijakan akuntansi yang mendasari pembuatan laporan keuangan dan penjelasan atas pos-pos tiap laporan keuangan.

IV.2.2 Dimensi Sistem Pengendalian Intern

<i>SPI</i>	
Mean	7.85
Standard Error	0.565628763
Median	7.5
Mode	6
Standard Deviation	3.577350402
Sample Variance	12.7974359
Kurtosis	-0.183967055
Skewness	0.199701352
Range	17
Minimum	0
Maximum	17

<i>SPI</i>	
Sum	314
Count	40

Tabel IV.2.6 Statistik Deskriptif SPI

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, setiap Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan secara efektif sistem pengendalian intern. *Scoring* pada sub-dimensi ini menunjukkan rentang nilai yang besar yaitu dari nilai 0 hingga nilai 17. Rata-rata nilai yang dicapai adalah 7,85 dengan modus nilai 6 padahal apabila semua syarat pengendalian intern terpenuhi nilai maksimal yang bisa dicapai adalah 24. Nilai rata-rata yang jauh dari nilai maksimal yang bisa dicapai menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tiap-tiap Kabupaten/Kota belum dijalankan secara efektif.

Jadi, tingkat kepatuhan yang dicapai tiap Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan keuangan secara umum baru memenuhi 58,67% syarat-syarat penyusunan laporan realisasi anggaran, 65,14% syarat-syarat penyusunan neraca, 88,33% syarat-syarat penyusunan laporan arus kas, dan 52,92% syarat-syarat penyusunan catatan atas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan prospek yang cukup bagus bagi penerapan standar akuntansi pemerintah mengingat legalitas atas standar ini baru disahkan tahun 2005. Namun, yang perlu menjadi perhatian bagi tiap-tiap pemerintah Kabupaten/Kota adalah agar membenahi sistem pengendalian intern agar kualitas laporan keuangan yang disampaikan tidak diragukan.

IV.3 Pengujian Asumsi Dasar, Kelayakan Model, dan Hipotesis

Setelah melakukan analisa yang menggunakan *check-list*, pembahsan selanjutnya adalah menguji hipotesis berdasarkan dua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan

aktiva atau aset daerah. Tujuan pengujian untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang berguna untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyusunan laporan keuangan.

Model penelitian diregresikan pada tiap variabel independen untuk membandingkan manakah di antara variabel tersebut yang memberi pengukuran lebih tepat dalam memenuhi hipotesis yang dikembangkan sehingga dapat disimpulkan faktor apa yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

IV.3.1 Pengujian Asumsi Dasar dan Kelayakan Model

Pengujian awal model regresi menghasilkan angka koefisien yang signifikan untuk variabel PAD dan koefisien yang tidak signifikan untuk variabel AKTIVA. Namun, model pada pengujian awal ini melanggar asumsi homokedastisitas karena nilai probabilitas pada uji *White* lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,002089. Model kemudian diregresikan kembali dengan memberi perlakuan *white heteroskedasticity consistent standard errors and covariance* untuk menghilangkan heteroskedastisitas ini. Pada pengujian ini, hanya angka koefisien untuk variabel variabel PAD yang signifikan karena nilai t statistik yang mendekati 2,00.

Asumsi kedua yang harus dipenuhi yaitu bebas dari multikolinearitas. Model regresi ini tidak menghadapi masalah multikolineritas karena masing-masing variabel independen memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,8 antar satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk keperluan analisa hipotesis hasil regresi yang digunakan adalah hasil regresi pertama karena menghasilkan lebih banyak angka koefisien yang signifikan. Berikut disajikan persamaan regresi dan hasil pengujian awal:

$$\text{SCORE} = -41.31585511 + 5.425274794*\text{PAD} - 1.681524618*\text{AKTIVA}$$

Dependent Variable: SCORE

Method: Least Squares

Date: 12/14/07 Time: 01:17

Sample: 1 40

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41.31586	44.80390	-0.922149	0.3624
PAD	5.425275	1.929366	2.811948	0.0078
AKTIVA	-1.681525	2.096054	-0.802233	0.4275
R-squared	0.207493	Mean dependent var		40.55000
Adjusted R-squared	0.164654	S.D. dependent var		7.507091
S.E. of regression	6.861274	Akaike info criterion		6.761702
Sum squared resid	1741.852	Schwarz criterion		6.888368
Log likelihood	-132.2340	F-statistic		4.843633
Durbin-Watson stat	1.276589	Prob(F-statistic)		0.013538

Tabel IV.3.1 Hasil regresi model

IV.3.2 Pengujian Hipotesis

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PAD berkorelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien variabel signifikan pada tingkat 5%. Hasil ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berkorelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Korelasi yang positif ini berarti pendapatan asli daerah yang tinggi diharapkan akan memicu penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai ekuitas dana lancar yang cukup untuk membiayai operasi atau aktivitas dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut terkait penyusunan laporan keuangan.

Namun, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel AKTIVA berkorelasi negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak signifikan baik pada tingkat 5% maupun 10%. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa total aktiva berkorelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien negatif dan tidak

signifikan berarti penyajian informasi total aktiva tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Jadi, dari pengujian hipotesis didapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah besaran **Pendapatan Asli Daerah**. Pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk memicu pembuatan laporan keuangan berkualitas sesuai standar. Dengan begitu, salah satu kendala informasi yang relevan dan andal terkait pertimbangan biaya dan manfaat dapat diatasi.

